

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Menyerahkan LHP atas Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) Semester II Tahun 2019 dan IHPS I Tahun 2019

Pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, bertempat di Auditorium BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pukul 14.00, dilaksanakan Acara **Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Semester II Tahun Anggaran 2019 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I 2019**. Dalam acara tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dhi. Kepala Perwakilan, Bpk. Ade Iwan Ruswana menyerahkan 6 LHP Pemeriksaan Kinerja dan 3 LHP PDTT serta IHPS semester I 2019 kepada DPRD dan Kepala Daerah, yaitu:

- **2 LHP** Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016-2018 pada entitas Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Timur;
- **2 LHP** Kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum dalam mewujudkan terselenggaranya wajib belajar 12 tahun untuk tahun ajaran 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 pada entitas Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Murung Raya;
- **2 LHP** Kinerja atas efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I tahun 2019 pada pemerintah daerah dan instansi terkait lainnya pada entitas Kabupaten Lamandau dan Kabupaten Kapuas; dan
- **3 LHP** PDTT Belanja Daerah pada entitas Kabupaten Seruyan untuuk TA 2018 dan 2019, serta pada Kabupaten Barito Utara dan Kabupaten Barito Selatan untuk TA 2019.
- **IHPS I Tahun 2019** memuat ringkasan dari 692 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri atas 651 (94,1%) LHP Keuangan, 4 (0,6%) LHP Kinerja, dan 37 (5,3%) LHP Dengan Tujuan Tertentu.

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua DPRD dan Kepala Daerah atau yang mewakili beserta jajaran Pemerintah Daerah serta Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Pemeriksa di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam sambutannya, Bpk. Ade Iwan Ruswana menjelaskan kesimpulan hasil pemeriksaan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian yang ditemukan BPK dalam pemeriksaan yaitu

1. Hasil pemeriksaan kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun Anggaran 2016-2018 menunjukkan bahwa Pemkab Kotim dan Pemkab Pulang Pisau perlu melakukan perbaikan atas permasalahan-permasalahan yang ada agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif. Hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah :

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- a. Penganggaran pendapatan transfer dari pemerintah pusat belum sepenuhnya sesuai dengan yang telah ditetapkan yang menyebabkan penganggaran DAK terlambat atau tidak dilaksanakan, bahkan membebani APBD TA 2018..
 - b. Penetapan Kebijakan Strategi Fiskal dan Penganggaran, diantaranya program dan kegiatan yang direncanakan oleh SOPD belum sejalan dengan RPJMD.
 - c. Peraturan yang melibatkan peran swasta dan masyarakat pada sektor perekonomian, pendidikan dan kesehatan belum sepenuhnya diimplementasikan.
2. Hasil pemeriksaan kinerja atas peningkatan kualitas pembelajaran bertujuan untuk menilai efektivitas upaya Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penjaminan mutu dan implementasi kurikulum 2013 dalam mewujudkan terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun menunjukkan bahwa upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam peningkatan kualitas pembelajaran melalui penguatan penjaminan mutu pendidikan dan implementasi kurikulum 2013 masih **Kurang Efektif**. Sedangkan Upaya Pemerintah Kabupaten Murung Raya masih **Tidak Efektif**. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
- a. Satuan pendidikan kurang memahami cara menyajikan potret sekolah dalam instrumen penjaminan mutu; dan belum menindaklanjuti rekomendasi hasil penjaminan mutu sebagai acuan perbaikan mutu pembelajaran;
 - b. Satuan Pendidikan belum menyiapkan penerapan pembelajaran kurikulum 2013 secara memadai; termasuk belum menyiapkan media/bahan ajar yang cukup untuk mendukung pembelajaran kurikulum 2013; dan belum memanfaatkan hasil penilaian dalam implementasi Kurikulum 2013;
 - c. Satuan pendidikan belum memanfaatkan hasil UN dan berbagai hasil evaluasi pendidikan untuk perbaikan pembelajaran dan belum melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) secara memadai.
 - d. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah belum optimal menjalankan langkah-langkah revitalisasi SMK;
3. Hasil pemeriksaan kinerja atas efektifitas pengelolaan dana bidang kesehatan bertujuan untuk menilai efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 menunjukkan bahwa Pemerintah Kab Lamandau dan Pemerintah Kab Kapuas **cukup efektif** dalam mengelola dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah:
- a. Rencana pemanfaatan dana kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum didukung sumber daya yang memadai. Selain itu perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan dasar belum memperhitungkan pemanfaatan sisa dana kapitasi tahun sebelumnya;

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH



- b. Rencana Pemanfaatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (DAU dan Dana Jasa Layanan Puskesmas) untuk Mendukung Pelayanan Dasar Belum Sepenuhnya Sesuai Skala Prioritas Kebutuhan dan Ketersediaan Sumber Daya;
 - c. Pemanfaatan Dana Kapitasi dan DAK Non Fisik-BOK pada Program dan Kegiatan untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Dilaksanakan secara Tepat Waktu dan belum sepenuhnya ditatausahakan sesuai dengan ketentuan;
 - d. Pemanfaatan dana kesehatan, dropping dan penempatan tenaga Nusantara Sehat pada Puskesmas belum memberikan dampak sesuai target yang direncanakan;
4. Pemeriksaan atas belanja daerah menunjukkan bahwa **kecuali** sub aspek yang menyimpang secara material yaitu kelebihan pembayaran dimana kuantitas dan kualitas pekerjaan tidak sesuai standar yang dipersyaratkan dalam kontrak dan ketentuan yang ada, pelaksanaan kegiatan belanja daerah pada Pemerintah Kab Seruyan dan Pemerintah Kab Barito Utara telah dilaksanakan **sesuai** dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan kontrak pekerjaan terkait dalam semua hal yang material. Sedangkan pada Pemerintah Kab Barito Selatan, **kecuali** sub aspek yang menyimpang dimana masih terdapat pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu kekurangan volume fisik pekerjaan dari kontrak, pelaksanaan Belanja Daerah, telah dilaksanakan **sesuai** dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu adanya kelebihan pembayaran sebesar Rp922,48 juta, potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp8,736 milyar, kekurangan penerimaan sebesar Rp474,22 juta dengan total sebesar Rp10,132 milyar.

Atas seluruh permasalahan yang ditemukan dalam pemeriksaan tersebut, BPK mengharapkan agar Pemerintah Daerah segera menindaklanjutinya sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Dalam acara tersebut, BPK sekaligus menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, yang memuat hasil pemeriksaan secara nasional, BPK mengungkapkan 9.116 temuan yang memuat 14.965 permasalahan, yang meliputi permasalahan kelemahan SPI, dan permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp9,68 triliun; serta permasalahan ketidakhormatan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp676,81 miliar. Atas permasalahan ketidakpatuhan tersebut, pada saat proses pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset dan/atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp949,10 miliar (9%).

Informasi lebih lanjut:

Subbagian Humas & TU Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Telp: (0536) 3241118

Email: palangkaraya@bpk.go.id